

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA TOPEJAWA DI KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan diusulkan oleh

ANDY IBRAHIM. Y

Nomor Stambuk : 10561 03889 10



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PENGAJUAN SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA TOPEJAWA DI KABUPATEN TAKALAR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diusulkan Oleh

ANDY IBRAHIM. Y

NomorStambuk : 10561 03889 10

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN

Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek
Wisata Topejawa di Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : **Andy Ibrahim. Y**

Nomor Stambuk : 10561 0388910

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Mengesahkan :

Pembimbing I



Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si

Pembimbing II



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. Hj. Iryani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Nasrulhaq, S.Sos., M.PA

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fishol Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 1361/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari jumat 31 Agustus tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Dr. A. Rosdianti Razak, M.Si



2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si



3. Dr. Anwar Parawangi, M.Si



4. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andy Ibrahim. Y

Nomor Stambuk : 10561 0388 910

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Agustus 2018

Yang Menyatakan,



Andy Ibrahim. Y

ABSTRAK

ANDY IBRAHIM Y. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Topejawa di Kabupaten Takalar.(dibimbingolehAndi Rosdianti Rsazak dan Jaelan Usman).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana partisipasi Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Topejawa di Kabupaten Takalar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah fenomenologi dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwaPartisipasi masyarakat sangat berperan untuk berdirinya tempat wisata ini. Berawal dari pengusulan kebijakan dan pengharapan-pengharapan dari masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonominya adalah nafas lega bagi sebagian masyarakat yang bisa turut bekerja di dalamnya. Partisipasi masyarakat dalam bidang sarana dan prasarana adalah hal yang sangat berpengaruh besar. Masyarakat sebagai tenaga kerja adalah tombak dari sebuah pekerjaan terlebih untuk tempat wisata ini yang cukup membutuhkan tenaga dan kerja keras.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Objek

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Topejawa Di Kabupaten Takalar”** dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dan bimbingan dari Ibu **Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Jaelan Usman, M.Si** selaku pembimbing II mulai dari penulisan proposal penelitian hingga pada penyelesaian skripsi. Disamping itu, penulis dengan tulus menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor **Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM** atas kebijaksanaan dan bantuan fasilitas yang diberikan
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak **Nasrulhaq, S.Sos., MPA** selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala bimbingan yang telah diberikan selama ini
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan
5. Ibunda dan ayahanda tercinta serta keluarga atas kasih sayang, doa dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis melaksanakan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar, Bapak Kepala Desa Topejawa beserta jajarannya, serta Objek Wisata Topejawa, terima kasih atas bantuannya sehingga penulis bisa melakukan penelitian
7. Rekan-rekan mahasiswa fisipol Unismuh Makassar dan sahabat- sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang selalu memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih, Allah SWT yang menentukan segalanya dan semoga kalian mendapat pahala yang berlimpah ganda di sisi-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tapi setiap manusia berpotensi melakukan gerak menyempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk referensi hidup di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini diberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah atas segala kebaikan kita semua. Amin

Makassar, 2018

Andy Ibrahim. Y

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Partisipasi Masyarakat	14
B. Konsep Pengembangan Objek Wisata	20
C. Konsep Pariwisata.....	26
D. Kerangka Pikir	31
E. Fokus penelitian	33
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	36
C. Sumber data.....	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Pengabsahan Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Partisipasi Masyarakat Dalam pengembangan Objek Wisata.....	45
C. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Objek Wisata	51
D. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan Objek Wisata	58

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	64
----------------------	----

DAFTAR TABEL

1.1	Daftar Jumlah Pengunjung Objek Wisata Topejawa.....	37
1.2	Daftar Wahana Dan Prasarana Lain Objek Wisata Topejawa.....	38
1.3	Daftar Informan Penelitian.....	39
1.4	Data Informan Penelitian.....	39
1.5	Tabel perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.....	44
1.6	Tabel perbandingan PTM dan sejahtera.....	45

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar bagang kerangka pikir	32
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata sangat berperan penting karena Pertama partisipasi masyarakat adalah suatu alat guna memperoleh atau mendapatkan informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat, tanpa adanya masyarakat program pembangunan dan juga proyek-proyek tidak akan berhasil, alasan kedua yaitu bahwa rakyat akan lebih percaya terhadap program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan persiapannya karena mereka juga akan tahu asal muasal dari proyek tersebut dan juga akan mempunyai rasa memiliki kepada pekerjaan tersebut.. Alasan ketiga yang akan mendorong adanya partisipasi yang bersifat umum di banyak daerah yaitu karena timbul pemikiran bahwa merupakan sebuah demokrasi bila kelompok masyarakat juga dilibatkan untuk pembangunan atau kemajuan masyarakat mereka sendiri.

Era otonomi daerah sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 32 tahun 2004, memberikan peluang bagi setiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri, serta tuntutan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata daerah yang ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber

dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi masyarakat. UU No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Peran serta masyarakat dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata.

Menurut Nurmawati (2006), pengembangan wisata alam dan wisata budaya dalam perspektif kemandirian lokal merupakan perwujudan interkoneksi dalam tatanan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri guna meningkatkan kualitas tatanan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal, serta obyek wisata alam dan wisata budaya yang ada. Selama ini pengembangan pariwisata daerah ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saat ini perencanaan pengembangan pariwisata menggunakan *community approach* atau *community based development*. Dalam hal ini masyarakat lokal yang akan membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi dan mengurangi urbanisasi (Nurhayati, 2005).

Menurut Panji (2005), usaha-usaha pengembangan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat lokal masih minim. Hal ini

dikarenakan masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Sehingga perlunya partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan, ikut menjaga keamanan, ketentraman, keindahan dan kebersihan lingkungan, memberikan kenangan dan kesan yang baik bagi wisatawan dalam rangka mendukung program sapta pesona, serta menanamkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengembangan desa wisata

Berhasil atau tidaknya pembangunan di daerah sebagai pengamalan Pancasila, ini tergantung dari partisipasi seluruh masyarakat di daerah serta tekad semangat dan sikap mental ketaatan disiplin para penyelenggaran daerah serta semua rakyat Indonesia. Partisipasi masyarakat didalam pembangunan dimaksudkan sebagai penyelenggaraan konsistensi pembangunan yang akan diarahkan pada sebuah keberhasilan program yang sudah ditetapkan termasuk di dalamnya kesungguhan agar mencapai tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan swasta. Kecenderungan permasalahan pembangunan partisipasi masyarakat dalam pelibatan pada proses program pembangunan baik pada kebijakan nasional maupun regional. Pergeseran paradigma pada orde baru sebelumnya masyarakat merupakan objek dari pembangunan, untuk itu masyarakat bersama dengan pemerintah dan swasta merupakan motor pembangunan untuk itu masyarakat merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Pariwisata pada masa kini merupakan sebuah kebutuhan mutlak bagi manusia, baik yang sedang melakukan perjalanan wisata ataupun juga masyarakat daerah sekitar untuk tujuan wisata. Wisatawan perlu dipuaskan kemauannya, sementara itu juga rakyat disekitar lokasi pariwisata yang berharap akan memperoleh dampak positif yaitu berupa peningkatan kesejahteraan dan pendapatan ekonomi. Fenomena ini juga harus menjadi perhatian oleh para penyampai kebijakan karena sebagaimana yang telah diamanatkan bahwa pembangunan atau kemajuan kepariwisataan daerah akan diarahkan menjadi sektor unggulan dan andalan secara meluas dan akan dimaksudkan sebagai pemasukan devisa terbesar yang juga akan meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan memberdayakan perekonomian masyarakat, serta kesempatan berusaha masyarakat sekitar.

Perhatian dari pemerintah terhadap sektor pariwisata telah diwujudkan dari berbagai kebijakan pemerintah daerah, dan salah satunya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Tahun 2014-2019, telah mengemukakan bahwa salah satu yang menjadi sasaran untuk meningkatkan disektor non migas yaitu dengan meningkatkan tarif akomodasi pariwisata dalam perolehan pemasukan devisa sehingga disektor pariwisata bisa diharapkan akan mampu menjadi sebuah pemasukan yang terbesar dari daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang pengusahaan pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan

taman wisata alam mengatur mengenai pengusahaan pariwisata alam. Berdasarkan itu, maka kebijakan pengembangan atau pembangunan kepariwisataan diarahkan agar meningkatkan efektifitas atau respon pemasaran melalui kegiatan pembangunan dan promosi produk wisata dan juga meningkatkan sinergi dalam hal jasa pelayanan pariwisata. Sebagai sebuah industri yang prospektif, upaya mengembangkan pariwisata agar mendorong kemajuan ekonomi daerah dan untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional dilakukan berbagai wilayah tak terkecuali di Kabupaten Takalar. Program untuk pengembangan pariwisata telah menjadi salah satu program yang sudah utama di Sulawesi Selatan yang kedepannya akan menjadi perhatian mutlak pemerintah Provinsi dan menjadi andalan Pemerintah untuk memulihkannya dari kondisi krisis negeri.

Pada masa ini, posisi sektor pariwisata telah menjadi sektor andalan yang dipercaya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai pendukung produksi komoditi lainnya yang ada di daerah. Pengembangan sektor pariwisata dilakukan dengan alasan karena akan mampu memberikan pemasukan atau kontribusi yang besar untuk penerimaan pendapatan daerah juga disamping itu dengan kegiatan pariwisata merupakan hal yang berhubungan erat dengan sumberdaya unik dari sebuah tujuan wisata yaitu didalam bentuk daya Tarik budaya dan alam suatu daerah. Dalam usaha untuk menjalankan program pengembangan pariwisata yang sedang rajin-rajinnnya dicanangkan oleh pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Takalar sedang berusaha meningkatkan citra baik atau positif daerah dalam

pengelolaan dan pemanfaatan potensi atau sumberdaya pariwisata yang sudah dimiliki. Selain dengan upaya pembangunan daya tarik dan obyek wisata dan kegiatan promosi dalam mensukseskan program di sektor pariwisata, diperlukan juga fasilitas pelayanan untuk wisatawan yang baik, seperti akomodasi yang nyaman, keamanan, sarana transportasi, kesehatan serta hal lainnya yang dianggap penting untuk menunjang tempat dan program pariwisata tersebut.

Pada dasarnya untuk pengembangan sektor pariwisata ini sangat ditentukan oleh pengembangan bentuk-bentuk nyata serta tidak nyata dari promosi produk dan program wisata itu sendiri. Sebagai contohnya adalah pengembangan wisata pesisir. Pemerintah Kabupaten Takalar mengembangkan berbagai destinasi wisata pesisir dan berbagai unit usaha masyarakat untuk menambah kebutuhan ekonomi masyarakat. Otonomi daerah adalah titik tolak bagi suatu daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi atau aset-aset sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan pembangunan ekonomi di daerah. Jadi, daerah perlu melihat lebih jelas sektor-sektor strategis yang dianggap memiliki potensi yang kuat untuk menopang pembangunan yang ada di daerahnya.

Adapun sektor strategis yang dimiliki oleh Kabupaten Takalar adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini dipandang perlu dikelola secara maksimal agar mampu untuk meningkatkan kunjungan wisata supaya dapat memberikan efek multiplier berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah, devisa Negara dan daerah, pendapatan masyarakat, memperluas lapangan

kerja dan pemerataan kesempatan berusaha serta mendorong kegiatan ekonomi industri pariwisata yang diharapkan bertahan lama, tidak hanya mengandalkan kepada pembangunan fisik saja seperti infrastruktur aksesibilitas berupa penyeberangan atau pelabuhan, jalan raya, dan bandara. Akan tetapi secara terpadu ini dilakukan bersama dengan pengembangan kualitas yang dimiliki individu sebagai pelaku kepariwisataan dan tanggapan positif masyarakat sekitarnya.

Pariwisata sebagai sebuah kegiatan dalam pembangunan yang diupayakan dapat sejalan dengan prinsip dan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan perlu menerapkan beberapa kaidah seperti: 1) Pengembangan pariwisata berorientasi jangka panjang dan menyeluruh (*holistic*) tidak hanya memanfaatkan tetapi juga sekaligus melestarikan daya tarik dan obyek wisata yang memberikan manfaat secara adil dan menyeluruh, 2) pembangunan pariwisata yang direncanakan sesuai dengan kondisi lingkungan, kontak sosial dinamika budaya, dan karakter wilayah 3) Penciptaan dengan keselarasan sinergis yaitu antara kebutuhan wisatawan dan semua penyediaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal, yang memunculkan hubungan saling menghargai dan timbal balik, kebiasaan, warisan budaya, dan adat istiadat 4) Pemanfaatan berbagai sumberdaya pariwisata yang sudah diperhitungkan kemampuan lestariannya, 5) Pengelolaan dalam kegiatan pariwisata yang peka dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi dari kedua sisi penawaran produk dan permintaan pasar.

Adapun dua hal penting yang menjadi penyebab metode yang sifatnya partisipatif dan dikembangkan dalam rangka untuk membantu memecahkan masalah yang ada dimasyarakat dan membantu dalam merumuskan program dalam memecahkan masalah. *Pertama*, selama ini masyarakat sudah cenderung dijadikan sebagai obyek dan bahkan tidak terlibat dalam merumuskan beberapa masalah dan menyusun beberapa program pembangunan untuk dirinya sendiri. *Kedua*, dalam menerapkan kebijakan yang bersifat membangun mereka, masyarakat akan lebih banyak berlakon sebagai penerima juga bukan sebagai pelaku utama terhadap pembangunan yang pada awalnya ditujukan untuk mereka sendiri pula.

Selama ini perumusan dan penentuan masalah ditentukan oleh beberapa ahli yang mempergunakan metode survey yang sifatnya berat sebelah kearah peneliti, sehingga biasanya tidak sesuai dengan permasalahan yang sesungguhnya sedang dihadapi oleh masyarakat. Pada akhirnya justru mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun dari program pembangunan di wilayahnya baik itu sifatnya sosial-budaya serta peningkatan pada taraf ekonomi.

Demikian juga dengan halnya yang terjadi di Kabupaten Takalar, selama ini masyarakat setempat kurang atau tidak diikuti sertakan dalam menyusun program pembangunan terutama pembangunan pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata dengan melakukan partisipasi perlu mendapatkan perhatian yang cukup, terutama dalam konsep untuk pengembangan pariwisata jangka panjang. Pariwisata memang belum sepenuhnya ergali secara optimal,

padahal disektor ini banyak mendapatkan keuntungan, baik dari pasar Internasional maupun pasar domestik. Bermodal dari berbagai kondisi alam wilayah yang telah dimiliki Indonesia, keberagaman masyarakat dan berbudaya yang lebih berkualitas, maka dalam pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat dianggap sangat potensial untuk dikembangkan supaya menjadi sektor andalan dalam penerimaan devisa. Dengan demikian, sangat diharapkan sektor pariwisata yang ingin dikembangkan melalui partisipasi masyarakat mampu menjadi sebuah lokomotif perekonomian di Kabupaten Takalar. Sebab dalam pengembangan sektor ini mempunyai keterkaitan erat bersama sektor lainnya, serta dapat menjangkau berbagai macam elemen baik pemerintah, pihak swasta, maupun dari masyarakat.

Sejalan dengan kondisi tersebut dan efek pertumbuhan ekonomi yang demikian besar, maka pemerintah daerah Kabupaten Takalar telah membuat program pariwisata yang diisi dengan kegiatan pokok yang secara bertahap perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, yakni:

1. Memantapkan strategi dan kebijakan pembangunan pariwisata daerah yang lebih berbasis kerakyatan dan berwawasan lingkungan.
2. Menyusun strategi terbaik dalam pengembangan objek wisata.
3. Meningkatkan daya saing dan memperluas diversifikasi daerah tujuan dan pariwisata dengan :revitalisasi program daerah sadar wisata, pengembangan wisata domestik, pengembangan wisata sungai dan budaya serta wisata alam, dan pengelolaan industri yang lebih bertanggungjawab.

4. Memantapkan strategi promosi pariwisata termasuk didalamnya pengembangan riset dan analisis pasar wisata.
5. Memperkuat dan mengembangkan database dan sistem informasi kepariwisataan.
6. Menumbuh kembangkan sekaligus menjalin koordinasi dan jaringan kerja antar wilayah, daerah, sektor, dan pelaku pariwisata.
7. Mengembangkan sinkronisasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang ada dibidang pariwisata antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
8. Meningkatkan peran serta antara masyarakat dan UKM dalam melaksanakan pembangunan industri wisata.
9. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana daya tarik dan obyek wisata.
10. Pengembangan dan peningkatan pelayanan publik.

Berbagai program ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat lebih memiliki keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam pemeliharaan dan peningkatan prasarana. Upaya dalam peningkatan peran serta kualitas keterlibatan masyarakat dan juga stakeholders dalam pengembangan pariwisata dengan pembentukan berbagai kelompok yang sadar wisata sebagai pelaku atau motivator utama dalam pengembangan budaya sapta pesona untuk masyarakat disekitar daya tarik dan obyek wisata, meningkatkan komunikasi antar *stakeholders* dan masyarakat dengan pihak yang terkait dalam mendorong tumbuhnya kemampuan masyarakat dan dapat

mengetahui apa yang menjadi kesulitannya dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan cara bersama sehingga ada atau tanpa bantuan fasilitas maka pemerintah dapat meningkatkan mutu keterlibatannya dalam pengembangan pariwisata, melalui penyelenggaraan persatuan kelompok masyarakat sebagai stakeholders bidang kepariwisataan di Kabupaten Takalar; mendorong perkuatan kelembagaan dan asosiasi kepariwisataan serta pelaku pariwisata.

Dikatakan juga bahwa pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut akan turut menentukan sejauh mana keberhasilan pengembangan sektor pariwisata didalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tahapan pengembangan pariwisata lewat pendekatan adalah satu mesin pendobrak pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan tentang masalah infrastruktur fisik yang tentunya sangat penting sebagai penunjang pertumbuhan dalam industri dan dunia usaha pariwisata yang berbasis kepada masyarakat.

Hal ini mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah sudah bias menyediakan fasilitas atau jasa khusus agar terpuhinya keinginan industri atau dunia usaha pariwisata, khususnya yang bisa menunjang pemberdayaan masyarakat. Dalam sebuah kebijakan pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Takalar menetapkan sektor wisata pesisir sebagai salah satu sektor unggulan yang mendorong pembangunan di Kabupaten Takalar. Kontribusi yang dapat diandalkan pada pembangunan ekonomi Kabupaten Takalar pada sektor pariwisata, diantaranya di industri pariwisata dan jasa-jasa, dapat

menciptakan lapangan kerja baru lagi untuk masyarakat secara langsung yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Takalar melakukan pengembangan-pengembangan kawasan obyek wisata yang ada.

Kegiatan pemasaran atau promosi ini sudah menjadikan daerah ini untuk dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan Nusantara. Namun kegiatan promosi tersebut akan menjadi kurang berarti apabila masyarakat lokal itu sendiri tidak ikut berpartisipasi dalam sektor pariwisata di Takalar. Partisipasi dari masyarakat adalah langkah dasar untuk membangun kerjasama yang baik antara pegawai pariwisata yang berperan sebagai pembuat kebijakan bersama dengan masyarakat sebagai pendorong suksesnya sebuah kebijakan tersebut dalam rangka perkembangan pariwisata. Sehubungan dengan itu maka penulis mengangkat sebuah penelitian yang berkaitan dengan masyarakat yaitu “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Topejawa Kabupaten Takalar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Topejawa Kabupaten Takalar ?
2. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Topejawa Kabupaten Takalar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Topejawa Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Topejawa Kabupaten Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi biasa digunakan dalam kajian menyangkut peranan anggota masyarakat baik secara formal maupun nonformal. Partisipasi juga merupakan keikutsertaan masyarakat pada suatu kegiatan. Pengertian seperti ini, tampaknya sama dengan pengertian yang dijabarkan oleh kamus bahasa sosiologi. Jadi partisipasi merupakan keterlibatan banyak orang dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Berhasilnya pembangunan Nasional sebagai wujud dari pengamalan Pancasila tergantung dari partisipasi semua rakyat dan juga sikap mental, tekad dan semangat, disiplin dan ketaatan dalam melaksanakan pembangunan. (Totok Mardikanto, 2015 : 81).

Suatu program yang berkaitan aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat tanpa peran aktifnya maka tidak akan berhasil, baik kedudukannya sebagai subjek maupun objek dalam pengembangan wilayah pesisir. Pengertian partisipasi digunakan pada konteks yang berbeda-beda baik secara umum maupun secara khusus. Menurut Awang (2009:131), partisipasi merupakan keterlibatan aktif dan berarti dari masa penduduk pada susunan tingkatan berbeda seperti:

- a. Di dalam pembuatan keputusan untuk menentukan tujuan atau maksud tersebut.
- b. Pelaksanaan program dan proyek secara sukarela serta pembagian yang memadai dan merata.

c. Pemanfaatan hasil dari sebuah program atau suatu proyek..

Sebagai suatu kegiatan, Verhangen (dalam Poerwoko, 2015:83) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Lebih lanjut, analisis tentang modal sosial terhadapmaksud yang penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan bahwa partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pada kegiatan pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat ialah perwujudan akan kesadaran serta kepedulian dan tanggungjawab masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang bermaksud untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, artinya dengan melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari jika kegiatan pembangunan bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah sendiri akan tetapi juga harus menuntut keterlibatan masyarakat yang juga akan diperbaiki kualitas hidupnya.

Jadi partisipasi masyarakat adalah partisipasi aktif baik dalam perencanaan, identifikasi masalah, pelaksanaan, evaluasi maupun monitoring dalam sebuah program atau kegiatan pembangunan. Pemahaman pengertian partisipasi tidak hanya cukup pada pengertian secara harfiah. Menurut Slamet (2008:67) memahami maksud partisipasi dapat dinilai dari 3 pandangan, terkhusus dalam partisipasi pembangunan.

- a. Cara pandang dimana partisipasi adalah kegiatan pembagian keseluruhan dari hasil pembangunan.
- b. Cara pandang dimana, khususnya masyarakat secara keseluruhan menyumbang jerih payah dalam proses pembangunan.
- c. Partisipasi harus berhubungan dengan pengambilan keputusan didalam pelaksanaan pembangunan, misalnya pembangunan wilayah pesisir melalui strategi program penanaman tumbuhan bakau.

Partisipasi masyarakat selanjutnya akan menyebabkan keterlibatan masyarakat secara khusus dalam mengikuti perubahan yang semakin nyata. Adanya perasaan ikut berpartisipasi dan memiliki dari masyarakat menunjukkan adanya komunikasi antara masyarakat dan lautan didalam mencapai sebuah tujuan yang diharapkan masyarakat sebanyak mungkin untuk ikut serta ataupun berperan aktif dengan pemerintah guna menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi disini juga bisa berupa partisipasi hasil pikiran atau ide, partisipasi tenaga atau keterampilan, partisipasi sosial serta partisipasi dalam pelaksanaan program. Jadi, Dari partisipasi ini ada banyak hal yang dapat diperoleh, diantaranya rasa tanggungjawab, rasa kompetisi dan solidaritas.

Partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam daerah termasuk dalam pengembangan pariwisata yang sangat penting dipublikasikan kepada semua pelaku yang terlibat. Partisipasi tidak hanya berasal dari masyarakat dan rakyat atau sekedar dari pemerintah saja, tapi harus ada dari semua pihak baik masyarakat atau rakyat maupun pemerintah, pihak swasta dan lainnya.

Jadi jelas bahwa yang dimaksud partisipasi yaitu kemampuan sistem pengelolaan atau penjagaan sumber daya perairan daerah untuk membuka kesempatan atau peluang seluas-luasnya bagi semua pihak yang akan terlibat dalam pengelolaan serta mengambil bagian secara aktif, berawal dari kegiatan perencanaan, identifikasi masalah, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi. (Simon, dkk., 2014)

Ada berbagai tingkatan dan arti partisipasi masyarakat menurut Raharjo (Poerwoko Soebiato, 2015:99) antara lain :

a. *Partisipasi Manipulasi* (Manipulative Participation)

Karakter dari model partisipasi yaitu keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada sebuah organisasi kerja, komisi kerja, dana atau kelompok-kelompok. Jadi tidak terfokus pada partisipasi individu.

b. *Passive Participation* (Partisipasi Pasif)

Partisipasi rakyat terlihat dari apa yang sudah diputuskan ataupun apa yang sudah terjadi, informasi dari pihak administrator meskipun tidak mau mendengar pendapat dari rakyat tentang keputusan ataupun informasi tersebut. Informasi yang akan disampaikan hanya untuk orang luar yang sudah Profesional.

c. *Participation by Consultation* (Partisipasi Melalui Konsultasi)

Partisipasi rakyat dengan berkonsultasi ataupun menjawab pertanyaan. Masyarakat dari luar mengartikan proses dan masalah-masalah pengumpulan informasi, serta mengawasi analisa. Proses konsultasi

inipandangan-pandangan rakyat tidak dipertimbangkan oleh orang luar dan tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan.

d. *Partisipasi for Material Incentives* (Partisipasi Untuk Insentif)

Partisipasi rakyat lewat dukungan seperti sumber daya, misalnya dukungan pangan, tenaga kerja, pendapatan ataupun insentif material lainnya. Sepertinya petani menyediakan tenaga dan lahan, tetapi mereka juga dilibatkan dalam proses percobaan dan pembelajaran. Adapun kelemahan dari bentuk partisipasi ini yaitu apabila insentif sudah habis maka teknologi yang dipergunakan dalam program ini juga tidak akan berlanjut.

e. *Functional Participation* (Partisipasi Fungsional)

Partisipasi dipandang dari lembaga eksternal sebagai sebuah tujuan akhir dalam mencapai target proyek, terkhususnya mengurangi biaya. Masyarakat mungkin turut serta melalui pembentukan kelompok dalam menentukan tujuan yang berkaitan dengan proyek. Keikutsertaan seperti itu sepertinya cukup menarik, dan masyarakat juga dilibatkan dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan, akan tetapi cenderung keputusan ini diambil sesudah keputusan utama ditetapkan dari orang luar desa ataupun dari luar komunitas masyarakat desa yang bersangkutan.

f. *Interactive Participation* (Partisipasi Interaktif)

Partisipasi rakyat dalam menganalisa bersama berupa pengembangan perencanaan aksi dan penekanan atau pembentukan lembaga lokal. Partisipasi dipandang sebagai sebuah hak,

tidak berarti suatu cara untuk mendapat target proyek saja, akan tetapi juga melibatkan berbagai disiplin metodologi dan ada juga proses belajar yang terstruktur. Pengambilan keputusan yang bersifat lokal oleh kelompok dan sebuah kelompok juga menentukan bagaimana ketersediaan dengan sumber daya yang dipergunakan, sehingga kelompok tersebut mempunyai wewenang untuk menjaga potensi apapun yang ada di lingkungannya.

g. *Self-Mobilisation* (Partisipasi Inisiatif)

Partisipasi rakyat lewat pengambilan inisiatif secara independen yang diperoleh dari lembaga luar untuk melaksanakan perubahan sistem. Rakyat mengembangkan hubungan bersama lembaga luar atau eksternal untuk advis yang berhubungan dengan sumber daya dan juga teknik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga akan mengawasi bagaimana jika sumber daya tersebut dipergunakan. Hal ini juga dapat dikembangkan jika pemerintah setempat dan LSM menyediakan satu kerangka pemikiran atau ide untuk mendukung sebuah kegiatan.

Secara sederhana, konsep partisipasi terkait dengan "keterlibatan suatu pihak dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain". Menurut Tikson (2001) partisipasi merupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai *stakeholders*, terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di tempat mereka masing-masing. Masyarakat turut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumberdaya dan penggunaannya.

Selama ini pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menggunakan pendekatan *community based tourism*, dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata. Dengan demikian keterlibatan pemerintah dan swasta hanya sebatas memfasilitasi dan memotivasi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan desa wisata untuk dapat lebih memahami tentang fenomena alam dan budayanya, sekaligus menentukan kualitas produk wisata yang ada di desa wisatanya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata akan membawa tuntutan bagi partisipasi masyarakat. Hal ini tentunya perlu ditumbuhkan pemahaman atau persepsi yang sama dari *stakeholders* terkait dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan desa wisata.

B. Konsep Pengembangan Obyek Wisata

Pengembangan adalah proses, cara pembuatan mengembangkan kesasaran yang dikehendaki (KBBI 1986, Balai Pustaka, Jakarta). Pengembangan adalah suatu usaha menuju kearah yang lebih baik yang menyebabkan adanya perubahan dan pertumbuhan. Perubahan itu bisa dalam arti kualitas dan kuantitas. Secara kualitas berarti meningkatkan daya tarik obyek wisata melalui peningkatan mutu pelayanan. Sedangkan secara kuantitas berarti perluasan keanekaragaman obyek wisata serta akomodasi lainnya.

Dalam upaya pengembangan suatu obyek wisata strategi-strategi dalam pelaksanaannya diperlukan untuk membuat suatu obyek wisata menarik dan memilikidaya jual yang tinggi. Adapun bentuk-bentuk strategi yang dilakukan adalah strategi promosi keseluruhan paket wisata baik obyek wisata alam maupun obyek wisata buatan melalui program pengembangan seperti:

1. Promosi dapat dilakukan melalui media brosur yang disebarakan di hotel atau tempat umum (mall atau pusat perbelanjaan)
2. Bekerja sama pada pihak hotel-hotel untuk mempromosikan obyek wisata ke pasar wisata internasional.
3. Promosi melalui media internet yang dapat dilakukan oleh pihak Sub Dinas Pariwisata bekerjasama dengan pihak sponsor yang memiliki jaringan bisnis di bidang pariwisata.

Suatu obyek wisata agar menjadi daerah tujuan wisata maka obyek wisata tersebut harus siap menerima kedatangan wisatawan dengan memberikan pelayanan yang baik setiap kunjungan wisatawan. Spilance (2014:192) menyatakan bahwa untuk menciptakan pemasukan yang banyak dari wisatawan maka dilakukan langkah-langkahdiantara lain:

1. Meningkatkan pelayanan terpadu terpadu di pintu gerbang masuk wisatawan sehingga mempermudah masuk wisatawan maupun keluar.
2. Meningkatkan pelayanan ke tempat tujuan wisata baik kegiatan pokok maupun penunjang

Menurut Yoeti (2015:55) ada tiga faktor yang dapat menentukan berhasilnya pengembangan pariwisata sebagai industri. Ketiga faktor tersebut adalah:

1. Tersedianya obyek dan atraksi wisata yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang yang mengunjungi suatu daerah wisata. Misalnya keindahan alam, hasil kebudayaan, tata cara hidup masyarakat, festival tradisional, dan upacara keagamaan.
2. Adanya accessibility yaitu prasara dan sarana dengan segala fasilitas sehingga memungkinkan para wisatawan mengunjungi suatu daerah tujuan wisata tersebut.
3. Tersedianya amenities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan selama dalam perjalanan wisata yang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri.

Damanik dan Weber (2006:48) menyatakan bahwa dalam pengembangan pariwisata, pemerintah memainkan peranan bahkan memiliki tanggung jawab dalam hal berikut:

1. Peraturan tata guna lahan pengembangan kawasan pariwisata
2. Perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya
3. Penyediaan infrastruktur pariwisata
4. Kebijakan fasilitas fiscal, pajak, kredit, dan ijin usaha
5. Keamanan dan kenyamanan berwisata
6. Jaminan kesehatan
7. Penguatan kelembagaan pariwisata

8. Pendampingan dan promosi pariwisata
9. Regulasi persaingan usaha
10. Pengembangan sumberdaya manusia

Masyarakat lokal sebagai pihak yang menerima kedatangan wisatawan, perlu dilibatkan dalam proses pengembangan pariwisata, supaya keberhasilannya lebih terjamin. Berbagai peran dapat dilaksanakan oleh masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata di daerahnya.

Peran yang dimaksud adalah:

- Menjadi pemandu wisata
- Menjadi pelaku usaha pariwisata
- Mengaktualisasikan budaya masa lalu
- Mengembangkan lembaga pariwisata

Menurut Mahdy (2008:76), peranan masyarakat dalam pengembangan adalah melalui perilakunya tentang kesadaran setiap warga masyarakat untuk merasa bertanggung jawab dan berpartisipasi di bidang pariwisata yang dikenal dengan istilah 'sadar wisata'

Daya tarik wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Obyek dan daya tarik wisata adalah yang menjadi sasaran perjalanan wisata. Hal-hal yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata menurut Marrioti adalah :

1. Benda – benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta yang berupa : Iklim, bentuk tanah, pemandangan alam, hutan belukar, flora dan fauna, dan lain – lain.
2. Hasil ciptaan manusia yang berupa benda – benda bersejarah, kebudayaan, keagamaan seperti : museum, perpustakaan, dan lain – lain.

Tata cara hidup masyarakat yang berupa kebiasaan hidup masyarakat dan adat istiadat yang merupakan daya tarik wisatawan. (Oka. A.Yoeti, 2016:42) Mengacu pada konsep pengembangan desa wisata dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2001), maka pola pengembangan desa wisata diharapkan memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat

Suatu desa yang tata cara dan ada istiadatnya masih mendominasi pola kehidupan masyarakatnya, dalam pengembangannya sebagai atraksi wisata harus disesuaikan dengan tata cara yang berlaku di desanya.

- b) Pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa

Pengembangan pariwisata di suatu desa pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di desa tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di desa dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pembangunan fisik yang dilakukan dalam rangka pengembangan desa seperti penambahan sarana

jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga desa tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati wisatawan.

c) Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian

Arsitektur bangunan, pola lansekap serta material yang digunakan dalam pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas desa, mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat.

d) Memberdayakan masyarakat desa wisata

Unsur penting dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan masyarakat desa dalam setiap aspek wisata yang ada di desa tersebut. Pengembangan desa wisata sebagai pengejawantahan dari konsep *Pariwisata Inti Rakyat* mengandung arti bahwa masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat diluar aktifitas mereka sehari-hari.

e) Memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan

Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) harus mendasari pengembangan desa wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik desa tersebut. Beberapa

bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah-rumah penduduk (*home stay*), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal, pertunjukan kesenian, dan lain-lain.

Pengembangan desa wisata merupakan bagian dari penyelenggaraan pariwisata yang terkait langsung dengan jasa pelayanan, yang membutuhkan kerjasama dengan berbagai komponen penyelenggara pariwisata yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

C. Konsep Pariwisata

Dilihat sudut pandang sosiologi, pelaksanaan kegiatan pariwisata sekurang-kurangnya mencakup tiga dimensi interaksi, yaitu: cultural, politik, dan bisnis. Dalam dimensi interaksi kultural, pelaksanaan kegiatan pariwisata akan memberi ajang berupa akulturasi budaya dari berbagai macam bangsa dan etnis. Lewat pariwisata, kebudayaan yang ada di masyarakat tradisional agraris dengan sedemikian rupa berpadu dan bertemu dengan kebudayaan yang ada di masyarakat modern industrial. Beberapa kebudayaan itu saling bersentuhan, saling beradaptasi, saling menyapa dan tidak jarang kemudian mereka menciptakan produk-produk budaya yang baru. Dilihat dalam dimensi interaksi politik, sebuah kegiatan pariwisata akan dapat menciptakan dua kemungkinan yang ekstrem, yaitu : (1) persahabatan antaretnis dan antarbangsa, dan (2) bentuk-bentuk penindasan, eksploitasi atau neokolonialisme. Di lain pihak melalui pariwisata, tiap-tiap bangsa dan etnis

dapat mengenal atau mengetahui tabiat, kepentingan dan kemauan bangsa dan etnis lain. (Sunyoto, 2011:33)

Dalam upaya mendalami kepariwisataan, perlu terlebih dahulu memahami berbagai definisi kepariwisataan secara komprehensif, sesuai dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1990 yaitu Tentang Kepariwisataannya utamanyapasal 1 Angka (1) sampai dengan angka (7) dan menyatakan bahwa :

1. Wisata merupakan sebuah kegiatan perjalanan dan atau sebagian dari kegiatan sukadan rela serta sifatnya sementara untuk ikut menikmati daya tarik dan obyek wisata.
2. Wisatawan yaitu orang yang sedang melakukan kegiatan berwisata.
3. Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk juga pengusaha daya tarik dan obyek wisata, serta usaha yang berhubungan dengan bidang yang bersangkutan
4. Kepariwisataan adalah semua atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata atau sejenisnya.
5. Usaha pariwisata merupakan usaha yang memiliki tujuan menyelenggarakan jasa pariwisata ataupun menyediakan serta mengusahakan daya tarik dan obyek wisata, usaha sarana dan prasarana pariwisata, maupun usaha lain yang berhubungan di bidangnya.
6. Daya tarik dan obyek wisata adalah semua hal yang menjadi sasaran dalam wisata.
7. Kawasan pariwisata yaitu kawasan dengan suasana tertentu yang dibangun ataupun disediakan untuk memenuhi kebutuhan penikmat pariwisata.

Kepariwisataan dapat diartikan sebagai sesuatu yang sangat abstrak. Bila dilihat secara khusus kepariwisataan ini, dapat dipergunakan sebagai sebuah alat untuk memperkecil jarak kesenjangan yang saling pengertian di antara daerah yang sudah berkembang dan biasanya adalah daerah wisatawan atau daerah “Pengirim Wisatawan” dengan daerah-daerah yang sedang berkembang wisatanya.

Pada awalnya bagian-bagian dari penyakit atau gejala pariwisata ini terdiri dari 3 unsur penting yakni : Manusia (yaitu Unsur insani sebagai pelaku dalam kegiatan pariwisata), Tempat (berupa fisik sebenarnya yang tercakup oleh kegiatan itu sendiri), serta waktu (berupa Unsur tempo yang kan dihabiskan ketika dalam perjalanan itu sendiri dan juga selama berdiam di tempat yang dituju). Inilah unsur-unsur yang akan menjadi sebuah syarat terjadinya masalah pariwisata tersebut. Akan tetapi ada juga faktor kas lainnya yang harus dituntut untuk menjadi pembeda kegiatan pariwisata dari sebuah kegiatan jalan-jalan atau sekedar makan angin pada suatu saat yang tertentu.

Selain itu ada beberapa faktor khas yang dimaksud dengan bepergian, yang menjadi sifat sementara bepergian tersebut yaitu penggunaan fasilitas wisata yang sudah dianggap paling sangat penting yaitu faktor kenikmatan atau kepuasan dan perasaan yang rileks atau santai berrekreasi. Dari faktor ini, bukankah menjadi faktor kepariwisataan yang sudah mutlak, meskipun ada dalam beberapa hal arti kenikmatan dan rekreasi bukan merupakan tujuan utama mereka pergi, melainkan orang yang berwisata dan berbisnis.

Segi lain dari pariwisata, hendaknya diartikan dari sudut pandang daerah penerima wisatawan. Dalam konteks ini pariwisata harusnya dipandang sebagai sebuah industri yang ikut memberi andil dalam proses pembangunan ekonomi dan sosial, baik daerah sedang berkembang, maka organisasi dan badan usaha tersebut harus tetap dianggap sebagai sebuah kesatuan industri, antara lain : titik berat yang menjadi tulang punggung perekonomian saat ini sedang beralih dari industri klasik kepada zaman revolusi Industri, ini memiliki dimensi dan pandangan yang bervariasi juga. Lagi pula pariwisata sebagai sebuah sektor yang kompleks, meliputi industri diartikan hal klasik, seperti industri cendras mata dan industri kerajinan tangan. Begitu pula transportasi dan penginapan secara ekonomi juga dapat dipandang sebagai industri. (Yusuf, 2012:13)

Pengertian klasik tentang industri ini, sudah sangat membuka jalan pendekatan atau keakraban secara lebih modern untuk menuju sebuah batasan arti jika industri sebagai sebuah kelompok badan usaha yang akan menghasilkan barang atau benda secara lebih modern untuk menuju suatu batasan arti jika industri sebagai sebuah kelompok badan usaha yang akan menghasilkan barang-barang tertentu. Sebuah industri yang dianggap oleh konsumen tetap harus saling menunjang secara baik, walaupun itu secara fisik industri mungkin berbeda. Pengertian itu juga bisa diperluas maksudnya sehingga mencakup atau memadai badan usaha yang menghasilkan sebuah jenis produksi dan melalui proses yang sama juga.

Apakah jasa-jasa tersebut termasuk pada kelompok pengertian industri atau tidak termasuk. Pertanyaan-pertanyaan ini hanya tentang masalah arti kata dari istilah industri itu. Mendesaknya sebuah kebutuhan masyarakat dalam kehidupan ekonomi modern ini telah mengakibatkan begitu perlu atau kompleksnya bidang produksi dan juga bervariasinya kegiatan produksi masyarakat sehingga tanggapan kita tentang apa dari istilah industri yang harus ditinjau kembali. Suatu produk atau kegiatan apakah yang dapat dikerjakan atau dijamah dan tidak dapat dijamah, apabila akan memenuhi kebutuhan tertentu dari seorang manusia harus dianggap sebagai sebuah produk industri. Jika serangkaian sebuah produk yang akan dihasilkan berbagai organisasi kerja dan badan usaha menunjukkan secara lebih khusus bahwa fungsi atau kegunaan mereka secara menyeluruh memiliki kaitan dan bisa membuktikan kedudukan atau posisi mereka dalam kehidupan ekonomi, maka organisasi dan badan usaha tersebut harus lebih dianggap sebagai sebuah kesatuan industri.

Berdasarkan dari sifat perjalanannya serta lokasi dimana perjalanan wisata dilakukan, Karyono (2007:21-22), mengklasifikasikan wisatawan sebagai berikut

1. Wisatawan Asing (*Foreign Tourist*) yaitu orang asing yang sedang melakukan perjalanan wisata yang telah datang memasuki suatu daerah lain yang juga bukan merupakan daerah dimana ia bertempat tinggal. Wisatawan asing bisa juga disebut wisatawan mancanegara ataupun disebut wisman.

2. *Domestic Foreign Tourist* merupakan orang asing yang telah berdiam atau bertempat tinggal disebuah daerah karena tugas, serta melakukan perjalanan wisata daerah dimana ia tinggal.

D. Kerangka Pikir

Setiap daerah atau wilayah memiliki berbagai sumber daya alam yang berlimpah. Keaneka ragaman sumberdaya alam disetiap daerah sangat baik dan menguntungkan jika sejalan dengan sumber daya manusia dan dapat dikelola dengan baik. Untuk itu pemerintah telah mencanangkan berbagai macam bentuk pengembangan obyek wisata yang ada disebuah daerah yang dapat memperbaiki kehidupan perekonomian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya wilayah pesisir.

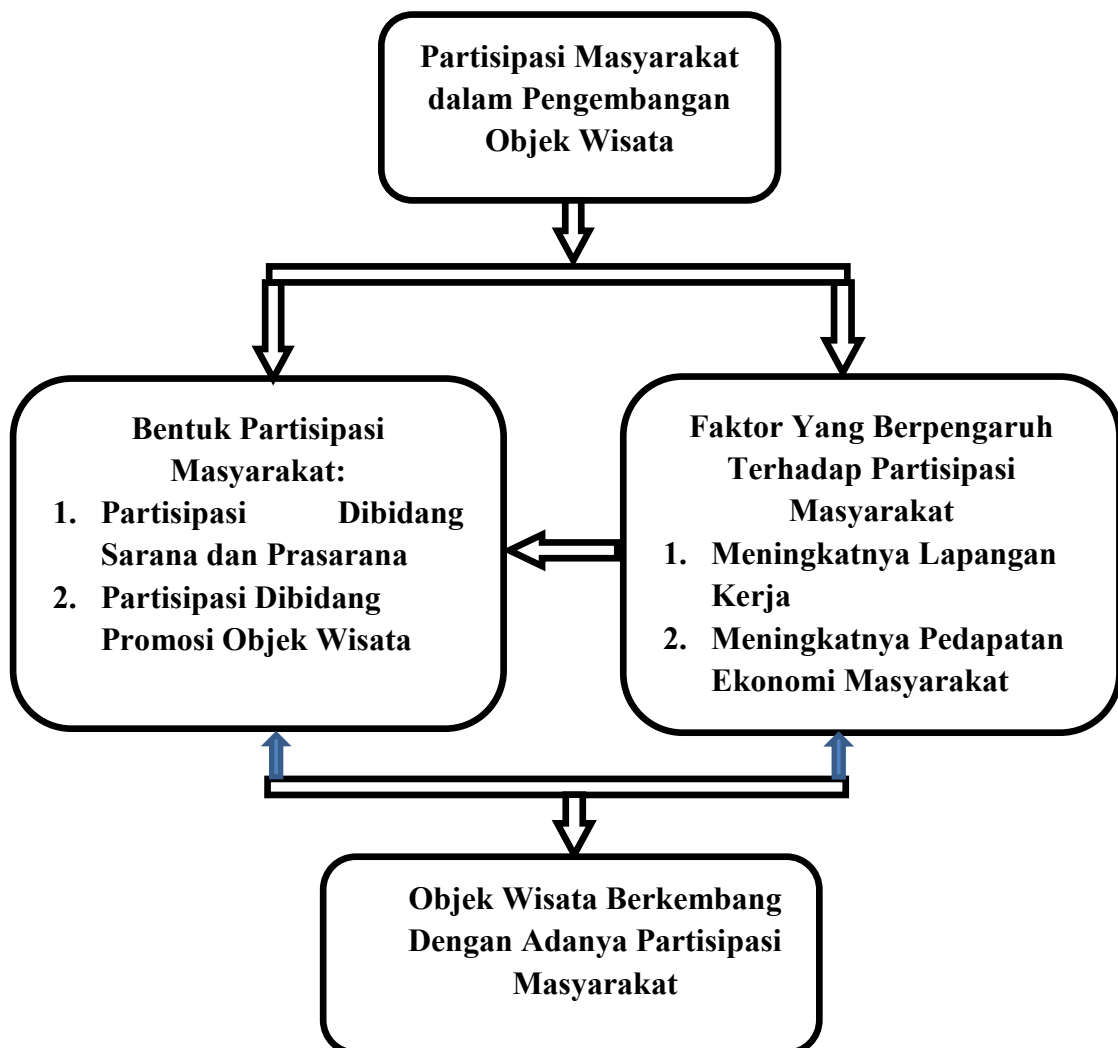
Partisipasi didalam proses pengelolaan sumber daya alam daerah maupun nasional termasuk dalam sebuah pengembangan pariwisata begitu sangat penting dipublikasikan kepada semua masyarakat atau pelaku yang terlibat. Partisipasi masyarakat bukan berarti hanya berasal dari masyarakat dan rakyat, atau hanya dari pihak pemerintah saja, akan tetapi partisipasi juga harus ada dari semua pihak baik masyarakat atau rakyat maupun pemerintah, bisa juga pihak swasta, dan lain-lain.

Menurut Simon,dkk (2014:43) bahwa partisipasi yaitu kemampuan sistem pengelolaan atau penjagaan sumber daya perairan daerah untuk membuka kesempatan atau peluang seluas-luasnya bagi semua pihak yang akan terlibat dalam pengelolaan serta mengambil bagian secara aktif, berawal dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan, serta pengawasan dan

evaluasi. Dan yang paling harus berbagai pihak tonjolkan dalam partisipasi ini yaitu: a) Partisipasi masyarakat dibidang sarana dan prasarana, b) partisipasi masyarakat dibidang promosi objek wisata serta c) Faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan objek wisata seperti meningkatnya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat.

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dapat digambarkan dalam skema berikut :

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat yaitu Dimana masyarakat di dusun Lamangkia Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar ikut serta dalam mengembangkan objek wisata tersebut.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Partisipasi masyarakat merupakan partisipasi yang aktif, baik dalam dalam perencanaan objek wisata yaitu pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan objek wisata yang merupakan perhatian pertama yang harus diambil oleh pihak pemerintah selaku penggagas objek wisata untuk melihat sejauh mana apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ini, kemudian pelaksanaan pengeloan dan pelayanan objek wisata yaitu setelah membahas dan sudah memiliki keputusan yang jelas tentang pengembangan objek wisata tersebut maka perlu dipetakan untuk memperjelas siapa pihak yang akan mengelola dan melakukan pelayanan di setiap pembagian kerja, serta pengawasan dan evaluasi dalam program pengembangan objek wisata yaitu banyak pihak yang dilibatkan dalam pengembangan objek wisata terlebih karena ini adalah gagasan pemikiran dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, agar objek wisata ini tetap berjalan dengan baik sesuai harapan dari berbagai pihak maka diperlukan pengawasan yang baik dan melihat sejauh mana tingkat kemajuannya.

2. Partisipasi masyarakat dibidang sarana dan prasarana adalah partisipasi masyarakat dengan melihat kesediaan sarana transportasi yang merupakan tolak ukur utama yang harus dipikirkan oleh pihak pemerintah dalam menciptakan kebijakan pembuatan objek wisata ini dengan melihat sejauh mana penyediaannya agar mudah dijangkau oleh pengunjung. Kesediaan prasarana wahana adalah sebuah kemunculan ide apapun bentuknya agar pengunjung lebih tertarik untuk datang disamping memikirkan letak strategis tempat wisata yang disediakan dan menjadi kebutuhan para wisatawan terhadap tempat wisata tersebut.
3. Partisipasi masyarakat dibidang promosi objek wisata adalah partisipasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi atau promosi dengan cara sosialisasi lisan berupa audio yaitu pihak tempat wisata bekerjasama dengan pihak lain untuk mengumumkan secara luas melalui video singkat atau melalui media sosial dan sosialisasi dalam bentuk tulisan berupa pembuatan plakat atau poster seryuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengajak dan menarik minat masyarakat untuk datang berkunjung ke objek wisata Topejawa Kabupaten Takalar.
4. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adalah hal-hal yang bisa berdampak baik yang ditimbulkan kepada masyarakat terkait dengan partisipasinya dalam mengelola tempat wisata tersebut diantaranya : (a) meningkatnya lapangan kerja dan (b) meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar objek wisata.

5. Meningkatnya lapangan kerja adalah faktor yang berpengaruh baik terhadap adanya objek wisata Topejawa dimana masyarakat diberi peluang untuk bekerja secara pribadi dengan berbagai keahlian dan kreasi masing-masing yang mereka miliki.
6. Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat adalah peluang terbesar yang dimiliki oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai faktor yang berpengaruh baik dengan adanya objek wisata Topejawa ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu penelitian.

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal pada tanggal 9 Juli 2018 sampai selesai. Penelitian ini bertempat di Objek Wisata Topejawa Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.

2. Lokasi Penelitian

Pemilihan dan penetapan lokasi ini adalah di Objek Wisata Topejawa Dusun Lamangkia Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Pemilihan lokasi berdasarkan bahwa wilayah ini memiliki salah satu objek wisata yang dikelola langsung pemerintah yang melibatkan banyak masyarakat setempat untuk turut berpartisipasi dalam mengelola tempat wisata tersebut.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha memberikan penjelasan dan gambaran mengenai berbagai macam data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian yaitu objek wisata Topejawa Kabupaten Takalar.

2. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian ini yaitu Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Topejawa di Kabupaten Takalar.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder.

1. Data Primer merupakan data hasil yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu objek wisata Topejawa Kabupaten Takalar.
2. Data Sekunder merupakan data yang di dapatkan bukan dari sumber pertama atau asli dari objek wisata. Data sekunder bersumber dari bacaan atau dokumen berupa artikel atau berbagai macam narasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Pengunjung Objek Wisata Topejawa

Bulan	Jumlah Pengunjung
Januari	642 Orang
Februari	604 Orang
Maret	698 Orang

April	729 Orang
Mei	1003 Orang
Juni	851 Orang
Juli	1202 Orang

Sumber : Pengelola Tarif Objek Wisata

Tabel 1.2 Daftar Wahana Dan Prasarana Lain Objek Wisata Topejawa

NO	NAMA WAHANA/PRASARANA
1	Aula Serbaguna
2	Mesjid
3	Gazebo
4	Café
5	Speed Boat
6	Kolam Renang Laki-Laki Dewasa
7	Kolam Renang Perempuan Dewasa
8	Kolam Renang Anak-Anak

D. Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan dengan cara *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik menggunakan pemilihan informan lanjutan dalam rangka penggalian data untuk mendapatkan ragam atau variasi dan kedalaman informasi yang diperoleh atas dasar rujukan atau rekomendasi dari seseorang yang sudah paham betul tentang pokok penelitian. Berikut yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu :

Tabel 1.3 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat pesisir	1
2	Pekerja di tempat wisata	6
3	Pendiri Wisata Pantai Topejawa	1
Jumlah		8

Tabel 1.4 Data Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	NAMA SAMARAN
1	Nurdin Ashari, S.Sos	NA
2	Hasyim	HM
3	Hamka Nazaruddin	HN
4	Muh. Karman Ridwan	MK
5	Syamsuddin	SY
6	Ferdi	FD
7	Ahmad Nur	AN
8	Parawangsa Lapang	PL

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara.

Penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang bersifat bebas dimana peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang sudah tersusun secara

baik dan lengkap untuk proses pengumpulan datanya. Panduan wawancara yang dipergunakan hanya titik-titik besar masalah yang akan ditanyakan kepada informan.

b. Dokumen

Dokumen yaitu bentuk lain dari data kualitatif adalah dokumen. Menurut **Emzir (2012: 75)** Dokumen dapat dikategorikan sebagai dokumen pribadi, dokumen resmi, dan dokumen budaya populer. Kadang-kadang dokumen ini digunakan dalam hubngannya dengan atau mendukung wawancara dan observasi berperanserta. Dokumen yang ditulis sendiri oleh informan atau tulisan tentang mereka seperti sebagai autobiografi, surat pribadi, buku harian, memo, catatan rapat, surat kabar, dokumen kebijakan, proposal, kode etik, artikel surat kabar, file pribadi, dan folder yang dimasukkan dalam data. Studi Dokumen di penelitian ini berbentuk artikel dari surat kabar dan file pribadi yang diberikan oleh seorang informan kepada peneliti.

c. Observasi

Penelitian ini menggunakan Observasi terus terang. Peneliti menggunakan sikap transparansi kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian dalam proses pengumpulan data. Jadi informan yang diteliti sudah tahu atau paham sejak awal sampai akhir tentang kegiatan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data untuk penelitian ini yaitu analisis data selama dilapangan, dalam analisis data kualitatif berlangsung terus-menerus sampai selesai sehingga datanya sudah jenuh dan dilakukan secara interaktif.

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data.

Mereduksi data berarti memilih hal pokok atau merangkum, fokus pada hal-hal penting yang dicari pola dan temanya. Jadi, data yang sudah direduksi akan memberi gambaran yang sangat lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melaksanakan pengumpulan data berikutnya, dan mencari bila dibutuhkan.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang paling sering digunakan adalah dengan data yang berbentuk naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami keadaan yang terjadi, merencanakan kerja kedepannya berdasarkan apa yang sudah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan.

Kesimpulan pertama yang akan ditampilkan masih sangat bersifat sementara, dan juga akan berubah bila ini tidak ditemukan bukti yang kuat dan yang mendukung pada proses pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti yang sudah valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelokasi mengumpulkan data,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan penarikan kesimpulan kredibel.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data didalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan triangulasi yaitu :

1. Triangulasi sumber dilaksanakan dengan cara mengecek data yang sudah didapatkan dari beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik dilaksanakan dengan cara mengecek data real kepada sumber yang serupa dengan teknik yang tidak sama.
3. Triangulasi waktu dilaksanakan dengan melakukan wawancara,observasi ataupun teknik lainnya denganwaktu atau situasi berbeda. Jika hasil uji menghasilkan data yang tidak sama, maka dilaksanakan secara berulang sehingga sampai didapatkan kepastian data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Kabupaten Takalar terletak sepanjang pesisir pantai Barat Selat Makassar sampai dengan pesisir pantai Selatan Laut Flores dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sepanjang 40 Km yang secara astronomis terletak di $119^{\circ} 10' 58.8216''$ sampai $119^{\circ} 38' 20.2056''$ dan $-5^{\circ} 36' 37.7568''$ sampai $-5^{\circ} 12' 40.5684''$, dengan luas wilayah 65.470 Ha dan keliling 282,7 Km. Kabupaten Takalar memiliki batas wilayah kabupaten antara lain sebelah utara dengan kota Makassar dan kabupaten gowa, sebelah timur dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa, sebelah selatan dengan Laut Flores, dan sebelah barat dengan Selat Makassar (gambar 4.7). Kabupaten Takalar mempunyai 7 Kecamatan, 18 Kelurahan dan Desa 55 buah, sedangkan desa swakarsa 40 buah dan desa swasembada 33 buah. Desa Topejawa berada di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Dan sebagian besar wilayah Desa Topejawa berada di pantai Barat Selat Makassar dengan luas wilayah 483,62 km. Dan secara administratif memiliki 4 (empat) dusun yakni Dusun Topejawa, Dusun Kajang, Dusun Lamangkia dan Dusun Topejawa lama.

2. Keadaan Demografi

Bila dilihat kondisi Desa Topejawa sebagai Desa Pantai diwilayah Selat Makassar maka wilayah Desa Topejawa yang merupakan dataran dengan ketinggian 1 meter, di atas permukaan laut dan secara geologis wilayah memiliki jenis tanah hitam yang berpasir disamping itu wilayah Desa Topejawa berada persis digaris Pantai Selat Makassar. Desa Topejawa memiliki 2 jenis iklim tropis dengan suhu rata-rata 28°C, serta memiliki dua tipe musim yaitu: musim hujan dan musim kemarau, musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan November dan musim hujan mulai pada bulan Desember sampai bulan April yang berputar setiap tahunnya dengan curah hujan rata-rata setiap tahunnya mencapai 28°C sampai 30°C.

2. Keadaan Sosial Dan Ekonomi

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Topejawa terdiri dari 1.019 Kepala Keluarga (KK) dengan total jumlah jiwa 3.845 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

Tabel 1.5 Perbandingan Jumlah Penduduk

Laki-Laki dan Perempuan

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.883	1.962	3.845

b. Tingkat Kesejahteraan

Perbandingan jumlah Rumah Tangga Miskin dan Sejahtera di Desa

Topejawa:

Tabel 1.6 Perbandingan Jumlah RTM Dan Sejahtera

RTM	Sejahtera	Jumlah
348	671	1.019

Desa Topejawa terdiri dari area pertanian dan persawahan yang masih bersifat tadah hujan oleh karena irigasi masih ada. Selain itu Desa Topejawa merupakan Desa Pantai sehingga banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Untuk pekerjaan sampingan selama ini tercapai 10% kepala keluarga di Desa Topejawa memiliki pekerjaan disektor: PNS, TNI, POLRI, Peternakan, Jasa dan Usaha Jual Beli Barang Campuran.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata

Partisipasi masyarakat merupakan partisipasi yang aktif, baik dalam (a) perencanaan, (b) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan, serta (c) pengawasan dan evaluasi dalam program pengembangan objek wisata Topejawa Kabupaten Takalar.

1. Perencanaan

Perencanaan dalam objek wisata yaitu pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan objek wisata yang merupakan perhatian pertama

yang harus di ambil oleh pihak swasta selaku penggagas objek wisata untuk melihat sejauh mana apresiasi masyarakat dengan rancangan tempat wisata ini.

Wawancara dengan Ketua Pemberdayaan Masyarakat Pesisir selaku Kepala Desa menyatakan bahwa.

“ Saya sangat mengapresiasi saat direncanakan bahwa tempat ini akan dijadikan sebagai destinasi wisata karena sama halnya ini akan memperkenalkan desa saya dimasyarakat luas dan akan banyak hal positif yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar”. (hasil wawancara dengan NA, 10 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam hal perencanaan pembangunan objek wisata perwakilan masyarakat sangat menyambut baik dengan adanya objek wisata ini. Partisipasi masyarakat dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam perencanaan kebijakan yang telah diciptakan oleh pihak swasta untuk membangun tempat wisata adalah bentuk hal penting.

Penjelasan yang diberikan informan tersebut juga senada dengan keterangan yang diberikan oleh salah satu pekerja tempat wisata selaku masyarakat menyatakan bahwa:

“ Sebelum jadi semua wahana ditempat wisata ini, saya diikut andilkan dalam perencanaan tempat wisata, kami kemudian dipanggil untuk turut berpartisipasi dalam membangun tempat wisata ini agar teralaksana dengan cepat dan baik ” (hasil wawancara dengan FD, 12 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa memang yang turut dilibatkan untuk berpartisipasi dalam perencanaan untuk mengembangkan tempat wisata ini adalah masyarakat pada umumnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dibutuhkan untuk menarik daya kreatifitas apa yang dimiliki oleh

masyarakat agar dapat tercipta suasana yang baru dan belum pernah ada sebelumnya di Kabupaten Takalar.

Berikut adalah pernyataan dari Masyarakat sekitar selaku pekerja di tempat wisata.

“ Inisiatif dari pendiri tempat wisata ini sangat disambut baik oleh masyarakat sekitar. Perencanaan mulai dari segi desain tempat dan letak strategis sudah direncanakan dengan baik oleh pihak swasta ini berdasarkan aspirasi masyarakat juga. Mereka melakukan refleksi perencanaan dengan matang” (hasil wawancara dengan HM, 10 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam perencanaan pengembangan objek wisata aspirasi masyarakat sangatlah di dengarkan penjabarannya karena merekalah yang akan terjun langsung sebagai penyelenggara dan secara umum sebagai unsur partisipatif untuk terus mengembangkan objek wisata selanjutnya. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah partisipasi langsung dalam mengembangkan objek wisata diwilayahnya.

2. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan objek wisata yaitu tindakan setelah membahas dan sudah memiliki keputusan yang jelas tentang pengembangan objek wisata tersebut maka perlu dipetakan untuk memperjelas siapa pihak yang akan mengelola dan melakukan pelayanan disetiap pembagian kerja diluar dari partisipasi masyarakat itu sendiri.

Wawancara dengan Pendiri objek wisata Topejawa adalah sebagai berikut.

“ Saya yang terjun langsung untuk mengelola tempat wisata ini untuk melihat capaian dari kinerja masyarakat yang turut berpartisipasi dalam mengembangkan objek wisata ini “ (hasil wawancara dengan PL, 12 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara diatas pendiri tempat wisata terjun langsung untuk melakukan pengelolaan agar ia dapat menyaksikan sejauh mana perkembangan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan objek wisata Topejawa. Karena masyarakat pada umumnya di tugaskan untuk melayani pengunjung secara langsung.

Pernyataan berikut sama halnya yang di paparkan oleh masyarakat selaku pekerja di tempat wisata .

“Setelah melakukan koordinasi langsung dengan pihak pengelola, kami selaku masyarakat melakukan strategi bagaimana melaksanakan pekerjaan masing-masing dan bagaimana cara melayani masyarakat sebagai pengunjung dengan baik” (hasil wawancara dengan KR, 11 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengembangan pariwisata dalam hal ini melibatkan semua lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah, baik kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat biasa diharapkan turut membantu dan menunjang keberhasilan pengembangan pariwisata. Dilihat dari sisi partisipasi masyarakat, strategi ini lebih memungkinkan timbulnya keikutsertaan masyarakat, Pemerintah Desa Topejawa dan Pemerintah Daerah Takalar untuk memajukan obyek wisata Topejawa yaitu mulai dari pengelolaan dan pelayanan telah melibatkan masyarakat secara luas.

Penjelasan yang diberikan informan tersebut juga senada dengan keterangan yang diberikan oleh pekerja di objek wisata Topejawa selaku masyarakat menyatakan bahwa:

“ Yang melakukan pengelolaan tempat dan melakukan pelayanan seutuhnya juga adalah masyarakat, karena yang dilibatkan dalam segala hal adalah masyarakat itu sendiri. Kami yang berperan langsung dan pihak swasta yang memfasilitasi apa saja kreatifitas masyarakat, dan ini harus dilaksanakan dengan baik untuk kenyamanan pengunjung “ (hasil wawancara dengan SY, 12 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pegelolaan dan pelayanan pada objek wisata adalah hal yang sangat perlu diperhatikan dan disusun rapi oleh pihak pengelola. Kenyamanan seorang pengunjung juga di dasari dari cara seorang pekerja melayani pengunjung dengan baik sesuai dengan pelayanan maksimal yang telah di paparkan sebelumnya oleh pihak pengelola mulai dari saat mereka memasuki area wisata sampai pada pelayanan disetiap wahananya.

Wawancara dengan masyarakat selaku pekerja ditempat wisata adalah sebagai berikut:

“Bisa dilihat dari awal direncanakannya tempat wisata ini, pengunjung sangat berantusias dengan baik untuk datang bersama-sama ketempat ini. Peluang untuk mendapatkan pelayanan dengan baik adalah sebagian dari impian mereka. Pengunjung adalah asset terbesar dari tempat wisata ini, jadi kami harus melayani mereka dengan baik” (hasil wawancara dengan AN, 13 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas di simpulkan bahwa seperti pada umumnya ditempat lain yang bergerak dibidang rekreasi masyarakat, maka setiap apa saja yang dilakukan pekerja adalah untuk kenyamanan pengunjung. Jadi, mereka perlu beretika dengan baik selaku pekerja ditempat wisata. Inilah yang akan menunjang pendapatan sebuah objek wisata jika para pekerja melaksanakan tugas dan pelayanan dengan baik pula

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi dalam program pengembangan objek wisata yaitu Banyak pihak yang dilibatkan dalam pengembangan objek wisata terlebih karena ini adalah gagasan pemikiran dari masyarakat setempat. Oleh karena itu agar objek wisata ini tetap berjalan dengan baik sesuai harapan dari berbagai pihak maka diperlukan pengawasan yang baik dan melihat sejauh mana tingkat kemajuannya.

Wawancara dengan Ketua Pemberdayaan Masyarakat Pesisir selaku Kepala Desa Topejawa :

“ Kebijakan yang sudah di keluarkan oleh pemerintah untuk peningkatan destinasi wilayah pesisir yang setiap harinya hanya begitu saja keadaannya sehingga muncullah pemikiran dari masyarakat untuk menyerukan hingga berdirinya tempat wisata ini. Respon kami yang baik adalah, bagaimana mengawal mereka untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan melihat kinerja mereka secara individu” (hasil wawancara dengan NA, 10 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas pihak pemerintah desa secara tidak langsung bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari setiap masyarakat yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mengembangkan tempat wisata ini. Masyarakat telah membagi diri untuk bersama-sama menciptakan hal-hal baru dan berusaha untuk mempertanggung jawabkannya dengan baik.

Sama juga halnya yang di paparkan oleh masyarakat selaku pekerja di objek wisata Topejawa :

“ Ada yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja secara langsung. Saya sangat menyambut baik hal ini karena di antara kami tidak akan muncul

kesenjangan dan persaingan yang kurang sehat karena kami memiliki misi yang sama untuk mengembangkan tempat wisata ini karena ini juga akan berdampak baik kepada kami” (hasil wawancara dengan SY, 13 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa telah ditunjuk untuk mengelola langsung dan menentukan petugas-petugas objek wisata secara khusus, dengan demikian tidak akan timbul lagi kesenjangan di mata masyarakat terkait dengan pelayanannya. Terkait dengan bagaimana seorang pekerja menjalankan fungsinya maka akan ada pihak yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi tempat wisata.

C. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek

Wisata

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata memiliki beberapa pembagian atau bentuk-bentuk partisipasinya. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu di bidang sarana dan prasarana serta di bidang promosi.

1. Partisipasi Masyarakat di Bidang Sarana dan Prasarana

Partisipasi masyarakat di bidang sarana dan prasarana adalah partisipasi masyarakat dengan melihat kesediaan (a) sarana transportasi dan (b) prasarana wahana dan tempat lainnya yang disediakan oleh pihak pengelola objek wisata Topejawa Kabupaten Takalar.

1.a Tersedianya Sarana

Unsur penting dalam pengembangan kawasan wisata adalah keterlibatan masyarakat sekitar tempat wisata dalam setiap aspek yang ada di

tempat wisata tersebut. Pengembangan tempat wisata sebagai penjabaran dari konsep pariwisata inti yang mengandung arti bahwa masyarakat desa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat diluar keluar kegiatan sehari-harinya.

Berikut adalah wawancara dengan masyarakat selaku pekerja di tempat wisata.

“ Pihak pengelola telah merancang dengan baik seluruh akses berdasarkan kebutuhan masyarakat meskipun itu belum terlalu sempurna karena setidaknya ketersediaan akses untuk tempat ini sudah baik sehingga dapat menarik minat pengunjung”. (hasil wawancara dengan KR, 12 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa desain dengan baik yang telah dilakukan pendiri tempat wisata atas masukan dan partisipasi masyarakat akan dikembangkan dengan baik sejalan dengan penyediaan akses jalan yang sudah dikembangkan dengan baik atas dukungan pemerintah dan akan dimaksimalkan dengan baik oleh masyarakat.

Sama hanya dengan paparan dari pendiri tempat wisata ini :

“ Melihat jalan yang akan dilalui oleh pengunjung sudah baik atas dukungan dari pemerintah. Arus transportasi umum yang juga sudah memasuki area ini namun belum maksimal juga akan diperbaiki dan akan disediakan untuk pengunjung yang belum memiliki kendaraan pribadi ” (hasil wawancara dengan PL, 12 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sarana adalah sebuah simbolis dari tempat wisata. Perlu sangat ditingkatkan untuk penyediaan sarana yang baik dari segi apapun. Akses jalan dan pengadaan transportasi

umum yang biasanya menjadi kendala untuk tempat wisata akan dimaksimalkan agar dapat dijangkau dengan baik dan nyaman oleh kendaraan umum.

Begitu pula yang dikatakan oleh masyarakat selaku pekerja di tempat wisata tentang partisipasinya di bidang sarana.

“ Pihak pendiri sedang merintis alat transportasi pelaku wisata yang ingin lebih menikmati liburannya dengan menyediakan kendaraan khusus pengunjung yang siap antar jemput ataupun yang tidak memiliki kendaraan pribadi”. (hasil wawancara dengan HN, 13 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Perencanaan awal dari pihak pengelola perlu dikembangkan untuk penyediaan sarana tempat wisata seperti kendaraan umum yang ada dan keluar masuk di area objek wisata. Oleh karena itu pihak pengelola perlu menjalin kemitraan dengan pihak perhubungan.

1.b Tersedianya Prasarana

Partisipasi masyarakat di bidang prasarana adalah partisipasi masyarakat untuk penyediaan wahana. Unsur penting dalam pengembangan kawasan wisata adalah keterlibatan masyarakat sekitar tempat wisata dalam setiap aspek yang ada di tempat wisata tersebut. Pengembangan tempat wisata sebagai penjabaran dari konsep pariwisata inti yang mengandung arti bahwa masyarakat desa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat diluar keluar

kegiatan sehari-harinya. Berikut adalah wawancara dengan masyarakat selaku pekerja di tempat wisata.

“ Pihak pengelola telah merancang dengan baik seluruh fasilitas berdasarkan kebutuhan masyarakat meskipun itu belum terlalu sempurna karena stetidaknya ketersediaan tempat beristirahat dan letak strategis tempat ini sehingga dapat menarik minat pengunjung”. (hasil wawancara dengan MR, 13 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa prasarana adalah sebuah simbolis dari tempat wisata. Perlu sangat ditingkatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang baik dari segi apapun. Begitu pula yang dikatak oleh masyarakat selaku pekerja di tempat wisata tentang partisipasinya di bidang sarana dan prasarana.

“ Atasan kami sedang merintis alat transportasi pelaku wisata yang ingin lebih menikmati liburannya dengan menyediakan kendaraan khusus pengunjung yang siap antar jemput ”. (hasil wawancara dengan SY, 14 Juli 2018)

Perencanaan awal dari pihak pengelola perlu dikembangkan untuk penyediaan sarana dan prasarana tempat wisata seperti lahan yang luas, tempat penginapan yang memadai dan latar tempat yang baik dan indah. Oleh karena itu pihak pengelola perlu menjalin kemitraan dengan pemerintah atau dengan pengusaha swasta.

Inilah yang dituturkan oleh Ketua pemberdayaan masyarakat pesisir selaku Kepala Desa.

“ Ada beberapa fasilitas yang disiapkan dan setiap pekerja disini sudah memiliki peran masing-masing meskipun belum terlalu banyak tenaga kerja. Ada yang mengurus wahana permainan, kolam renang, gazebo, tempat ibadah, kantin atau resto, parkir, dan karcis untuk masuk ”. (hasil wawancara dengan NA,10 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa setiap wahana ataupun tempat yang disediakan oleh pihak pengelola maka pekerja yang akan mempertanggungjawabkan tugasnya masing-masing. Berikut adalah wawancara dengan masyarakat selaku pekerja di tempat wisata.

“ Saya petugas yang mengurus untuk penyediaan gazebo bagi pengunjung dan ini memiliki konsekuensi tersendiri untuk melayani permintaan pengunjung dengan tarif yang sudah ditetapkan “. (hasil wawancara dengan HN, 12 Juli 2018)

Setelah melakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bidang sarana dan prasarana adalah hal yang sangat berpengaruh besar. Masyarakat sebagai tenaga kerja adalah tombak dari sebuah pekerjaan terlebih untuk tempat wisata ini yang cukup membutuhkan tenaga dan kerja keras.

2. Partisipasi Masyarakat di Bidang Promosi Objek Wisata

2.a Promosi Lisan

Promosi lisan adalah hal yang dilakukan oleh masyarakat selaku pelaku partisipan untuk melakukan tindakan memperkenalkan objek wisata melalui audio atau apapun yang bukan dalam bentuk tulisan.

Berikut adalah wawancara dengan masyarakat selaku pekerja ditempat wisata.

“ Setelah mendapat izin pembangunan dari pemerintah saya sudah banyak melihat banyak postingan dari pihak pengelola terkait serta masyarakat dimedia sosial untuk mempromosikan tempat ini dengan berbagai macam kreasi wacana “ (hasil wawancara dengan AN, 13 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa promosi lisan dilakukan dengan berbagai cara. Pembuatan video atau audio lainnya adalah unsur

pendukung untuk mempromosikan tempat wisata. Berikut adalah pemaparan dari masyarakat selaku pekerja di tempat wisata :

“ ada orang yang bersedia membuatkan video sebelum tempat wisata ini di buka oleh karena itu kami termasuk mudah untuk menarik minat pengunjung “ (hasil wawancara dengan KR, 14 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pada hakikatnya telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkreasi dan melakukan pembangunan sarana rekreasi keluarga. Namun ini diperlukan perencanaan yang lebih matang, terlebih untuk tindakan promosi yang harus di jalankan semua pihak yang terkait di dalamnya.

2.b Promosi Tulisan

Promosi tempat wisata dianggap sebagai rencana atau strategi yang wajib untuk dilaksanakan sebagai modal investasi kedepannya. Terkadang tindakan promosi dianggap hal yang biasa dan terkadang ada pihak yang sedikit lupa untuk tindakan ini.

Berikut adalah wawancara dengan masyarakat selaku pekerja di tempat wisata antara lain :

“ Ada beberapa strategi yang pihak pengelola lakukan untuk mempromosikan tempat ini seperti pemasangan spanduk atau baligho disepanjang jalan di kota Takalar pada khususnya ”. (hasil wawancara dengan MK, 13 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa strategi promosi tulisan termasuk strategi yang utama juga . Pembuatan alat promosi lainnya

yang di dukung oleh pihak lain juga akan menjamin bahwa banyak pengunjung yang akan datang

Begitu pula yang dikatakan oleh masyarakat selaku pekerja ditempat wisata:

“ Saya diberikan amanah untuk membagikan beberapa selebaran kepada masyarakat disekitar tempat wisata ini dulu, kemudian berangsur menyebar ke masyarakat luas sebagai strategi dalam mempromosikan tempat wisata “. (hasil wawancara dengan HN, 13 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa masyarakat yang turut bekerja serta pihak pengelola tetap akan melakukan pengembangan isu lokal tentang tempat wisata ini agar kedepannya pengunjung akan tetap menjadikan tempat wisata ini sebagai tujuan utama untuk mengajak dan menghibur keluarga mereka. Pembangunan seluruh sarana juga akan tetap dilaksanakan selama itu masih untuk kenyamanan pengunjung, itulah bentuk promosi selanjutnya. Berikut adalah wawancara dengan masyarakat selaku pekerja ditempat wisata :

“ Strategi lain yang dimunculkan yaitu bagaimana kita menampilkan wacana dan gambar-gambar ilustrasi dari tempat yang sudah kami rancang sehingga membuat masyarakat tertarik untuk berkunjung bersama keluarga mereka “. (Wawancara Selasa, 10 Juli 2018)

Begitupula wawancara yang dilakukan kepada Ibu M.S selaku pekerja ditempat wisata.

“ Bentuk promosi dari pihak kami yaitu ada berbagai macam, bukan hanya dengan bentuk selebaran ataupun baligho tetapi kami juga mengajukan promosi audio di radio local Takalar “. (Wawancara Selasa, 10 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan yang berbeda maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dibidang promosi merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari pengambilan kebijakan pembangunan tempat wisata. Promosi tempat wisata Topejawa dilakukan dengan berbagai strategi untuk dikerjakan semaksimal mungkin.

D. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan Objek Wisata

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adalah hal-hal yang bisa berdampak baik yang ditimbulkan kepada masyarakat terkait dengan partisipasinya dalam mengelola tempat wisata tersebut seperti meningkatnya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat sekitar objek wisata.

1. Meningkatnya Lapangan Kerja

Pengaruh yang muncul terhadap pengembangan objek wisata ini membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Modernisasi yang sudah terkontaminasi dengan masyarakat lebih meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap apa yang ada disekitarnya. Kebutuhan istimewa masyarakat diantaranya barang-barang elektronik dan gaya mode yang sekarang sudah membaaur akan menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap materi lebih meningkat. Mereka akan lebih membutuhkan pekerjaan yang bisa menjamin kebutuhan istimewa mereka tanpa perlu merantau ke daerah lain. Berikut adalah wawancara dengan Bapak H.N sebagai pekerja ditempat wisata.

“ Secara khusus, masyarakat merespon baik dengan adanya tempat ini. Pihak pengelola tidak memfokuskan untuk merekrut warga sekitar tempat wisata saja akan tetapi juga warga dari kecamatan lain di Kabupaten Takalar “. (Wawancara Selasa, 10 Juli 2018)

Hadirnya tempat wisata itu sebagai wujud kebijakan dari pemerintah untuk kesenangan hati masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi terlalu jauh untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan mereka sebelumnya. Mayoritas pekerjaan dari masyarakat pesisir adalah sebagai nelayan meskipun mereka masih berusia muda. Fokus dari pemerintah setempat untuk meningkatkan lapangan kerja harus menjadi tujuan utama dengan adanya tempat wisata ini. Pembukaan lapangan kerja yang cukup membutuhkan banyak sumber daya manusia merupakan hal langka yang diciptakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah cukup paham akan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Pemerintah daerah melalui kebijakan ini cukup memberikan hela nafas lega bagi masyarakat . Berikut adalah wawancara dengan Bapak M.K selaku pekerja ditempat wisata.

“ Pihak pengelola berniat baik membuka lapangan kerja untuk kami karena mereka juga berasal dari pihak pemerintah. Kegiatan sebelumnya sebagai nelayan kapal kecil yang tidak menentu sudah menunjang sedikit untuk keperluan saya dan keluarga “. (Wawancara Selasa, 10 Juli 2018)

Pihak pengelola langsung tempat wisata telah memiliki rancangan khusus dengan mengandalkan wahana yang ada sebagai wadah untuk menarik tenaga kerja yang banyak sebagai pemenuhan kuota standar pelayanan wahana yang baik agar masyarakat selaku pengunjung bisa dilayani dengan baik. Wahana tidak dianggap sebagai sekedar wahana saja tetapi ini adalah sebuah potensi

khusus sebagai kreatifitas pekerja tempat wisata. Sama halnya wawancara yang dilakukan kepada Bapak K.R yang juga sebagai pekerja ditempat wisata.

“ Wahana dan prasarana yang lain banyak disediakan disini, jadi masyarakat sekitar tempat ini banyak yang di Tarik untuk bekerja dan akan lebih banyak lagi yang dipekerjakan untuk kedepannya setelah semua fasilitas selesai karena sampai sekarang fasilitas masih ada yang akan dikembangkan“. (Wawancara Selasa, 10 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan tempat wisata ini dapat menunjang terbukanya lapangan kerja yang banyak bagi masyarakat sekitar tempat wisata. Kebutuhan masyarakat pada dasarnya bergantung dimana tempat ia bekerja, karena semakin baik bentuk pekerjaannya maka semakin banyak upah yang mereka peroleh.

2. Meningkatnya Pendapatan Ekonomi Masyarakat

Pemilihan lokasi dan minat masyarakat untuk berkembang demi kemajuan kebutuhan ekonomi mereka dianggap sebagai sebuah strategi baik yang diambil oleh pihak pengelola. Kebesaran hati masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan wisata ini membuat tempat ini akan disambut baik oleh masyarakat setempat atas kedatangan pengunjung. Berikut adalah wawancara dengan Ibu H.J terkait promosi objek wisata.

“ Tempat itu memang eksotis dan memiliki daya tarik yang kuat berdasarkan pemilihan tempat dan penyediaan fasilitas sehingga masyarakat sekitar diluar tempat wisata itu juga berpeluang untuk menyediakan jualan bagi pengunjung sebelum masuk ke tempat wisata. Ini dianggap sebagai hal positif yang di terima oleh masyarakat sekitar tempat wisata “ (Wawancara Jumat, 6 Juli 2018)

Selain untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat, pengaruh lain yang ditimbulkan dengan adanya objek wisata Topejawa ini adalah meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat. Semampu apapun pihak pemerintah dan pihak pengelola objek wisata merintis perkembangan objek wisata tetapi belum terlihat adanya peningkatan ekonomi masyarakat sekitar maka ini adalah hal yang terbilang sedikit gagal. Semua pihak harus mengevaluasi dari awal seberapa jauh implikasi kebijakan ini memiliki pengaruh yang baik bagi masyarakat terlebih untuk peningkatan ekonominya. Berikut adalah wawancara dengan Bapak NS selaku pekerja ditempat wisata:

“ Sekarang yang masyarakat seperti kami inginkan adalah bagaimana bisa merubah nasib kami yang awalnya hidup kekurangan menjadi hidup yang berkecukupan. Selama adanya tempat wisata ini, kami merasa cukup. Perhatian dari pihak pengelola terhadap penilaian kinerja kami sangat bagus terlebih dihari libur yang kapasitas pengunjung cukup banyak, itu memiliki bonus tersendiri” (Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2018)

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan wawancara dengan beberapa orang informan yaitu kehadiran tempat wisata ini mendapatkan hal positif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi serta kebutuhan istimewa dari masyarakat yang kian hari semakin meningkat nilai jualnya untuk mereka. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk pengembangan tempat wisata, begitupun mereka yang sangat menginginkan pekerjaan dari tempat wisata ini.

BAB V

PENUTUP

E. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat sangat berperan untuk berdirinya tempat wisata ini. Berawal dari pengusulan kebijakan dan pengharapan-pengharapan dari masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya adalah nafas lega bagi sebagian masyarakat yang bisa turut bekerja di dalamnya. Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat diantaranya partisipasi masyarakat dalam bidang sarana dan prasarana adalah hal yang sangat berpengaruh besar. Masyarakat sebagai tenaga kerja adalah tombak dari sebuah pekerjaan terlebih untuk tempat wisata ini yang cukup membutuhkan tenaga dan kerja keras. Bentuk partisipasi masyarakat selanjutnya adalah partisipasi masyarakat dibidang promosi merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari pengambilan kebijakan pembangunan tempat wisata. Promosi tempat wisata Topejawa dilakukan dengan berbagai strategi untuk dikerjakan semaksimal mungkin.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat terhadap objek wisata Topejawa yaitu meningkatnya lapangan kerja yang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar objek wisata. Begitu pula dengan kehadiran tempat wisata ini mendapatkan hal positif bagi masyarakat yaitu meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi serta kebutuhan istimewa dari masyarakat yang kian hari semakin meningkat nilai jualnya maka juga diperlukan nilai uang yang cukup besar. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk

pengembangan tempat wisata, begitupun mereka yang sangat menginginkan pekerjaan dari tempat wisata ini.

F. Saran

1. Wujud dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sebaiknya dipertimbangkan lebih baik lagi tentang prasarana yang disediakan oleh pemerintah sebelum di fasilitasi lebih lanjut oleh pihak swasta.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata ini kiranya bisa menghimpun lebih banyak kalangan masyarakat yang memiliki apresiasi yang tinggi terhadap perkembangan pariwisata di wilayahnya
3. Partisipasi masyarakat dalam peningkatan daya tarik kepada masyarakat luas sebaiknya lebih menggunakan strategi yang lebih baik lagi terutama untuk penyediaan sara dan prasarana yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Kabul Mahil. 2016. *Pengembangan Wilayah (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Kencana
- Finna Rizqinna. 2010. *Partisipasi Masyarakat*. www.lontar.ui.id. Hal 14
- Isbandi Rukminto Adi. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- James J Spilance. 2014. *Ekonomi Pariwisata : Sejarah dan Prospeknya*. Bandung: Kanisius.
- Mardikanto Totok. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Oka.A Yoeti. 2015. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soleh Munawar. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Usman Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Zubaedi, (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktiknya*, Jakarta: Kencana

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata

LAMPIRAN

Lampiran 1

NO	MATRIKS PERTANYAAN
1	Bagaimana pemikiran Bapak/Ibu tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Topejawa ini ?
2	Sejauh mana Bapak/Ibu dilibatkan dalam partisipasi terhadap penyediaan sarana dan prasarana di tempat wisata ini ?
3	Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terhadap promosi di objek wisata Topejawa !
4	Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap adanya objek wisata Topejawa bagi masyarakat sekitar ?

RIWAYAT HIDUP



ANDY IBRAHIM. Y. Dilahirkan di Ujung Pandang Kota Makassar Pada Tanggal 25 Oktober 1992, dari pasangan Ayahanda **MUHAMMAD YAHYA** dan Ibunda **SYAMSIAH**. Penulis masuk Sekolah Dasar pada Tahun 1999 di SD Negeri 39 Centre Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Tamat Tahun 2004, masuk Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan Tamat Tahun 2002, Penulis melanjutkan kembali Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2007 dan Tamat Tahun 2010. Kemudian Pada Tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai Tahun 2018.